

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemahaman klasik dari para penstudi Hubungan Internasional mengenai sengketa perbatasan antar negara (*border disputes*) pada dasarnya merujuk pada kontrol atau penguasaan wilayah (Westcott, 2022). Sengketa perbatasan tersebut, menimbulkan tantangan terhadap integritas teritorial negara. Juan Vasquez menegaskan bahwa wilayah merupakan aset yang berpotensi menimbulkan konflik antar negara dengan sikap saling mengklaim dengan alasan mempertahankan wilayah (Vasquez, 2009). Oleh karena itu, sebagian besar negara cenderung sangat sensitif tentang letak perbatasannya. Adanya sengketa perbatasan antar negara membawa risiko konflik bersenjata dan erosi kepemilikan teritorial negara, serta merupakan potensi ancaman terhadap keamanan atau bahkan kelangsungan hidup suatu negara (Mearsheimer J. , 2014).

Fenomena hubungan internasional mengenai sengketa perbatasan yang cukup intens pada era kontemporer seperti sekarang ini, terjadi antara India dan Tiongkok di daerah Ladakh (India) yang merupakan garis terluar dan membatasi teritorial India dan Tiongkok. Sejatinya, persaingan antara India-Tiongkok sendiri dipenuhi oleh ketegangan yang dipicu oleh sengketa perbatasan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam sejarahnya, pada tahun 1962 sengketa perbatasan antara India-Tiongkok mengakibatkan pecahnya perang di Aksai Chin dan Assam. Kekalahan India dalam perang tersebut kemudian menghasilkan *Line of Actual Control* (LAC) yang membagi wilayah perbatasan menjadi tiga bagian yaitu:

Western Sector, Middle Sector, dan Eastern Sector. Namun dengan disepakatinya LAC ini tidak turut serta berhasil meredakan sengketa perbatasan antara India-Tiongkok, sehingga persaingan geopolitik antara kedua negara masih terus berlanjut hingga saat ini (Banerjee, 2022). India dan Tiongkok memiliki klaim yang saling bertentangan atas wilayah Ladakh, di mana India mengklaim bahwa Ladakh merupakan bagian dari Jammu dan Kashmir, sedangkan Tiongkok mengklaim Ladakh sebagai bagian dari wilayah Aksai Chin yang dikuasai oleh Tiongkok sejak tahun 1962.

Ladakh sendiri merupakan wilayah strategis yang sangat penting bagi strategi geopolitik kedua negara. India dan Tiongkok sama-sama berupaya untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut baik melalui pembangunan infrastruktur, kegiatan militer, maupun investasi ekonomi. Sengketa perbatasan ini telah terjadi sejak tahun 2017 dan 2019, kemudian pada tahun 2020, ketegangan antara pasukan kedua negara di sepanjang garis LAC meningkat dan menjadi sebuah konflik perbatasan. Pada Mei 2020, kedua negara mengarahkan lebih banyak pasukan tambahan hingga akhirnya terjadi bentrokan fisik antara pasukan kedua negara.

Pada 15 Juni 2020, bentrokan ini menewaskan 20 orang tentara India dan sejumlah tentara Tiongkok terluka (BBC News, 2020). Konflik perbatasan ini terus berlanjut hingga terjadi insiden penembakan pada bulan Juli – Agustus 2020. Pada September 2020, setelah melalui negosiasi yang intens, kedua negara sepakat untuk menarik pasukannya di wilayah perbatasan tersebut. Namun, insiden penembakan

masih tetap terjadi meskipun kedua negara sudah menarik pasukannya, serta konflik ini masih belum terselesaikan dan terus berlanjut hingga saat ini.

Lebih lanjut, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok telah berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan melalui pembangunan infrastruktur dalam kerangka *Belt Road Initiative* (BRI). Secara geopolitiknya, kebangkitan Tiongkok menekankan keamanan kawasan yang bertujuan mempertahankan wilayah dan memperkuat klaim teritorial khususnya di wilayah Himalaya, yang merupakan perbatasan antara India-Tiongkok (Sarkar, 2021). Berdasarkan laporan tahunan mengenai anggaran militer global yang diterbitkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) tahun 2020, anggaran militer Tiongkok yang digunakan untuk modernisasi dan pengembangan militer di kawasan Indo-Pasifik mencapai US\$ 252 miliar dan menempati urutan tertinggi ke-2 di dunia (Silva, Tian, & Marksteiner, 2021).

Dalam laporan yang dirilis oleh *The Military Balance 2021*, Tiongkok tercatat memiliki personel militer terbesar di dunia dengan jumlah tentara aktif yang lebih dari 2 juta dan cadangan militernya sekitar 500 juta orang. Tiongkok juga memiliki kekuatan udara dan laut yang signifikan dan semakin modern dengan total sekitar 2.500 pesawat tempur, serta lebih dari 350 kapal perang dan kapal selam (IISS, 2021). Peningkatan kekuatan militer Tiongkok tersebut kemudian memicu ketegangan dengan Tiongkok dan pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), kondisi keamanan kawasan Indo-Pasifik ini kemudian selaras dengan pernyataan John J. Mearsheimer yang

berpendapat bahwa negara-negara di dunia berada dalam sistem internasional yang anarki, sehingga kekuatan militer merupakan aspek utama dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya (Mearsheimer, 2013). Dengan Tiongkok yang ingin memiliki kontrol atas sumber daya alam dan jalur perdagangan maritim di kawasan dan juga dilakukannya pembangunan pulau-pulau buatan dan pangkalan militer di kawasan, menimbulkan persepsi ancaman bagi negara-negara lain khususnya India yang juga memiliki ambisi menjadi aktor utama dalam menciptakan keamanan kawasan di Indo-Pasifik.

Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa kawasan “Indo-Pasifik” telah menjadi ruang atau arena bagi negara-negara di kawasan untuk saling berinteraksi dan saling terhubung satu sama lain khususnya dalam kerangka keamanan kawasan. Bentuk interaksi dan pola saling ketergantungan keamanan tersebut pada akhirnya merujuk kepada konstruksi geopolitik kawasan. Colin Flint memberikan pemahaman tentang konsepsi geopolitik kawasan ini sebagai pola interaksi antar “agen geopolitik” (negara) yang akan mengonstruksi identitas kawasan menjadi kompleks atau “messy” (Flint, 2021). Pada konteks yang sama, Barry Buzan menyebutnya sebagai kompleksitas keamanan kawasan atau *regional security complex* (Buzan & Wæver, 2003).

Asumsi Colin Flint dan Barry Buzan tersebut, menunjukkan bahwa saling ketergantungan keamanan antar negara di kawasan Indo-Pasifik akan memunculkan bentuk keamanan kawasan yang kompleks. Dalam sejarahnya, konsep Indo-Pasifik pertama kali muncul dengan kata “*Indo-Pasific Strategy*” dalam jurnal penelitian Guurpet S. Khurana pada tahun 2007 sebagai suatu konsep

kawasan yang strategis (Khurana, 2007). Di tahun yang sama, Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, memperkenalkan dan menyebarkan istilah Indo-Pasifik dalam pidatonya “*Confluence of The Two Seas*” di Parlemen India (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007). Dengan demikian, Indo-Pasifik menjadi kawasan potensial dengan besarnya konflik dan kerja sama kawasan, serta persaingan kekuasaan di dalamnya (Hall, 2020).

Lebih lanjut, letak geografis kawasan Indo-Pasifik mencakup wilayah yang luas dengan banyak sub-kawasan termasuk di antaranya yaitu wilayah Pesisir Timur Afrika, Samudra Hindia, Asia Tenggara, Asia Timur, Oseania, dan wilayah Pesisir Barat Amerika Serikat. Kawasan Indo-Pasifik kemudian menjadi semakin menarik dengan kehadiran negara-negara *major power* seperti AS, Tiongkok, Jepang, dan India. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya Tiongkok dan India semakin meningkatkan anggaran militernya, yang membuktikan ambisi mereka dalam menjadi aktor utama dalam persaingan mendapatkan pengaruh di kawasan.

India sebagai negara yang memiliki singgungan kepentingan langsung dengan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik, khususnya dengan adanya konflik perbatasan di wilayah Ladakh pada tahun 2020, hal ini membentuk suatu konstruksi interaksi atau hubungan keamanan yang saling bergantung antar kedua negara tersebut. Dalam merespons kebangkitan militer Tiongkok, India secara signifikan telah meningkatkan anggaran militernya hingga mencapai US\$ 72,9 miliar pada tahun 2020, dan menempati urutan tertinggi ke-3 di dunia setelah AS dan Tiongkok (Silva, Tian, & Marksteiner, 2021). India memiliki personel militer terbesar keempat di dunia dengan total lebih dari 1,2 juta tentara aktif. Adapun kekuatan

udara India yaitu terdapat sekitar 1.500 pesawat tempur; seperti Sukhoi Su-30MKI, Mirage 2000 dan MiG-29, dan juga kapal yang semakin modern dengan total lebih dari 200 kapal perang dan kapal selam (IISS, 2021).

Manjeet S. Pardesi dalam penelitiannya menyatakan bahwa persaingan antara India dan Tiongkok merupakan persaingan asimetris, hal ini dijelaskan melalui tiga faktor utama persaingan asimetris yaitu kapabilitas *power* secara material, persepsi ancaman, dan status negara (Pardesi, 2021). Dengan mengacu pada faktor-faktor tersebut, Tiongkok tentu memiliki keuntungan yang signifikan atas India dalam hal ukuran ekonomi dan investasi infrastruktur yang lebih besar, kemampuan militer dan teknologi pertahanan yang lebih maju. Kedua, mengenai bagaimana kedua negara memandang ancaman yang dihadapinya, India dan Tiongkok memiliki persepsi yang berbeda. India menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi kedaulatan dan integritas wilayahnya, namun di sisi lain Tiongkok melihat India sebagai negara yang ingin menghalangi pengaruhnya di Asia. Ketiga, terkait status politik dan sosial dalam mengatasi isu keamanan, Tiongkok memiliki keuntungan dalam relasi hubungan internasional yang lebih luas dan kuat, sementara India memiliki kebebasan dan stabilitas politik yang lebih tinggi. Dengan demikian, persaingan antara India dan Tiongkok merupakan persaingan asimetris.

Holslag dalam penelitiannya kemudian menyatakan bahwa bukan hanya faktor *gap material power* antara India dan Tiongkok saja yang asimetris, namun dengan kebijakan India yang bersifat *non-alignment* ataupun non-blok juga berpengaruh terhadap persaingan ini (Holslag, 2018). Sehingga dibandingkan interaksi keamanan yang terbentuk antara India dan Tiongkok tersebut merupakan

indikasi dari penyeimbangan kekuatan (*Balance of Power*), penelitian ini justru akan fokus melihat fenomena interdependensi keamanan India-Tiongkok dalam kerangka konstruktivisme. Alexander Wendt berpendapat bahwa dalam perspektif konstruktivisme – interaksi antar negara-negara ini dapat dikategorikan ke dalam “identitas” dengan pola hubungan yang dapat berupa persahabatan (*amity*), permusuhan (*enmity*), dan bentuk ancaman (*threats*) (Wendt, 1999).

Martha Finnemore dalam tulisannya “*Constructing Norms of Humanitarian Intervention*” kemudian menyatakan bahwa identitas negara akan membentuk kepentingan nasional yang kemudian memengaruhi keputusan kebijakan luar negerinya (Finnemore, 1996). Dengan meningkatnya kehadiran Tiongkok yang mengancam kepentingan India, sehingga identitas India yang netral dan damai harus dihadapkan langsung dengan Tiongkok ini mendorong tindakan perubahan orientasi geopolitik India untuk semakin proaktif. Dengan mengelaborasi asumsi Alexander Wendt dan Martha Finnemore, konstruktivisme berupaya untuk membedah bagaimana pengaruh identitas dan norma dapat membentuk persepsi hubungan antar negara serta mendorong perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

India yang memersepsikan Tiongkok sebagai ancaman didasarkan pada identitas yang dimiliki oleh Tiongkok dalam konteks kepentingannya di Indo-Pasifik – di mana hal ini dianggap dapat mengganggu kepentingan India, sehingga India perlu membentuk identitas baru melalui perubahan kebijakan luar negerinya. Namun, tindakan ini dapat dianggap bertentangan dengan identitas India yang selama ini lebih cenderung berpola *non-alignment*. Untuk itu, dengan tindakan

kebijakan keamanan India yang semakin proaktif di kawasan Indo-Pasifik, maka perlu diukur rasionalisasi perubahan kebijakan keamanan tersebut.

Kebijakan luar negeri India dalam konteks kawasan Indo-Pasifik kemudian terbentuk melalui orientasi geopolitik India khususnya dalam konteks keamanan. Dengan mengacu pada persaingan asimetris India-Tiongkok serta konflik perbatasan di Ladakh pada tahun 2020, maka semakin terbukti bahwa Tiongkok merupakan ancaman nyata bagi India. Dengan demikian, penelitian ini berfokus bentuk strategi India dalam konteks menghadapi ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Selain itu, strategi India yang semakin mengarah pada bentuk pemanfaatan instrumen serta entitas yang ada dan telah dibangun India di kawasan Indo-Pasifik – dalam hal ini adalah kehadiran *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) sebagai kerja sama keamanan kawasan yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India – dapat membantu dalam meningkatkan stabilitas keamanan Indo-Pasifik. Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan bahwa Quad dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen geostrategi India khususnya dalam menghadapi ancaman Tiongkok.

Quad atau *Quadrilateral Security Dialogue* merupakan suatu inisiatif diplomasi dan keamanan yang melibatkan empat negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Kerja sama ini pertama kali dimulai pada tahun 2007 sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Pada dasarnya, Quad bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan

dan strategis antara negara-negara demokratis dan mempromosikan perdagangan bebas serta keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik (Manhas, 2022).

Quad semakin aktif pada tahun 2017 yang dibentuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, dengan kerangka Quad Plus dalam bidang keamanan yang dilakukan dengan berbagai latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan koordinasi strategi keamanan (Manhas, 2022). Dalam setiap pertemuan tingkat Menteri yang dilakukan Quad tersebut puncaknya ialah pada tahun 2021. Pada Agustus 2021, Quad melakukan latihan militer bersama yang bertajuk “*Exercise Malabar*”, yang dilakukan di pantai Guam dengan melibatkan kapal perang, pesawat tempur, dan tentara dari keempat negara anggota (America's Navy Press Office, 2021). Lalu, pada September 2021, Presiden AS, Joe Biden, mengadakan pertemuan puncak pemimpin Quad di Washington DC, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama keamanan dan strategis di antara negara-negara anggota (WH.GOV, 2021).

Dalam kerangka geopolitik India yang memiliki lokasi strategis di kawasan, hal ini menjadikan India sebagai salah satu negara penting terhadap kawasan Indo-Pasifik. India sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan memiliki kepentingan dalam memastikan stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik, khususnya dalam hal kebebasan berlayar dan perdagangan maritim yang bebas hambatan. Sehingga pada konteks dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, penelitian ini akan melihat dari sudut pandang India. Sebagaimana PM India, Narendra Modi, pada tahun 2015, menyatakan posisi India di kawasan sebagai berikut “...to help India position itself in a leading role, rather than [as] just a balancing force,

globally.” (Press Information Bureau, 2015). Pernyataan ini membuktikan bahwa India memiliki ambisi untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan di Indo-Pasifik.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, terlihat bahwa gambaran persaingan asimetris dan konflik antara India-Tiongkok di perbatasan merupakan ancaman nyata bagi India, di samping itu India terus menggiatkan kerja sama keamanannya dengan Quad. Hal penting yang ingin dibangun dalam konteks ini adalah bagaimana India mampu memanfaatkan kerja sama keamanan Quad sebagai cara India untuk berhadapan dengan ancaman Tiongkok. Dengan mengukur sejauh mana strategi geopolitik India, maka yang akan dibedah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi geopolitik India melalui kerja sama keamanan Quad dapat memberikan keuntungan bagi India khususnya dalam menghadapi ancaman Tiongkok di kawasan dan juga menjadi instrumen paling tepat bagi India sehingga menimbulkan efek *deterrence* bagi Tiongkok.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fenomena ini akan diangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Geopolitik India Melalui *Quadrilateral Security Dialogue* dalam Menghadapi Ancaman Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik.”**

1.2. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, terkait orientasi kebijakan keamanan India yang semakin proaktif dan mengarah kepada dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang diakibatkan oleh konflik perbatasan dengan Tiongkok, maka menimbulkan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut

“Bagaimana orientasi kebijakan geopolitik India dapat memenuhi *extended deterrence* melalui kerja sama *Quadrilateral Security Dialogue* dalam menghadapi ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik?”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, mengingat kompleksnya pembahasan keamanan dalam konteks Indo-Pasifik, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih fokus. Penelitian ini hanya akan fokus mengkaji bagaimana strategi geopolitik India yang dilakukan melalui *Quadrilateral Security Dialogue* dalam menanggapi ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Rentang waktu penelitian ini meliputi periode penting dalam dinamika persaingan asimetris India-Tiongkok, dengan beberapa peristiwa signifikan yang memengaruhi keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, yaitu tahun 2018 – 2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap India dalam merespons ancaman Tiongkok khususnya dalam konteks geopolitik.
2. Untuk memahami bagaimana India melalui kerja sama keamanan *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) digunakan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman Tiongkok secara geopolitik.
3. Untuk memahami agenda Quad dalam konteks memenuhi aspek *deterrence* India pada orientasi geopolitik.

4. Untuk memahami kompleksitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik dalam menentukan orientasi kebijakan geopolitik India melalui kerja sama keamanan Quad.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional dan dapat bermanfaat serta membantu pihak-pihak yang tertarik dalam memahami interaksi antar-negara dalam konteks dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan perubahan strategi geopolitik India dalam menghadapi ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai manfaat praktis, penelitian ini diperuntukkan menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti, serta sebagai salah satu syarat kelulusan Ujian Sarjana Program Strata-1 dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.